



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

INSPEKTORAT

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR: 188.4/KEP- 008/ITDAKAB/2024

TENTANG

RENCANA AKSI (RA) KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun Rencana Aksi kinerja sasaran Perangkat Daerah. Rencana Aksi atau action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323};
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80};
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASER
TENTANG RENCANA AKSI (RA) KINERJA TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Paser ini;
- KEDUA : Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU digunakan sebagai landasan dan Acuan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Lampiran Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 08 Januari 2024

Inspektur,



Hj. Dharni Haryati, SE.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TRIWULAN				RENCANA AKSI
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,5	Nilai	✓	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3 (3.200)	Nilai	✓	✓	✓	✓	
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Nilai	✓	✓	✓	✓	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,7	Nilai	✓	✓	✓	✓	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	139	Laporan		✓	✓	✓	Melaksanakan Audit (Kinerja dan Ketaatan) Pengendalian Inflasi Daerah, Peningkatan Penggunaan PDN dan Reviu (RPJPD, RPJMD, RKPD dan RENJA)
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	146	Laporan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Reviu (DAK, KUA PPAS dan RKA) dan Monitoring LHKAN
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Laporan	✓				Melaksanakan Reviu (LPPD & Lkjp) dan Pendampingan Penerepan SPM
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	23	Laporan	✓				Melaksanakan Monitoring Kas UPTD Kesehatan, Reviu Kas BOSREG Sekolah dan Reviu LKPD Pemda

	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	55	Laporan		✓	✓	✓	Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa, Efektivitas pengelolaan keuangan desa, Pengawasan BLT DD, Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Reviu Pengadaan Barang Jasa di Desa, Reviu atas Kualitas Belanja Desa, Pemantauan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Reviu atas Proses Evaluasi Rancangan APBDesa TA. 2025
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk	1	Kesepakatan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Kerja sama denan pihak Eksternal
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Laporan		✓		✓	Membuat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32	Laporan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Audit Tujuan Tertentu/Penanganan Pengaduan Masyarakat/Permintaan APH/Audit Investigasi
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	80	Persen	✓	✓	✓	✓	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	80	Persen					
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah	✓	✓			Melaksanakan Reviu/Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan Monitoring Pelaksanaan Manajemen Risiko (MR)

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Monitoring Penilaian Mandiri (SPIP) Terintegrasi, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Menpan RB atas LKjIP Pemda, Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Pemda, Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi Pemda dan Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Daerah
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Kegiatan		✓	✓	✓	Melaksanakan Asistensi Pemenuhan MCP dan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan Gratifikasi
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Perangkat Daerah	✓				Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK
	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	B (70)	Nilai	✓	✓	✓	✓	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	✓		✓		Membuat Dokumen RKT, RENAKSI, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, PKPT dan PKPT Perubahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	✓	✓	✓	✓	Membuat Laporan APIP Semester 1 Semester 2 dan Laporan TL BPK Semester 1 Semester 2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	✓	✓	✓	✓	Membuat Laporan Evaluasi Renja Ttriwulan I, II, III dan IV dan LKjIP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang / Bulan	✓	✓	✓	✓	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 Tahun

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200	Dokumen	✓	✓	✓	✓	Membuat Dokumen SPP/SPM, Laporan Pajak, Laporan NTPN, Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Rekonsiliasi Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	✓				Membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan dan Menyusun Dokumen Rekonsiliasi BMD PD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Penatausahaan BMD PD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen				✓	Membuat Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang		✓			Melaksanakan Diklat Penjenjangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	✓	✓	✓		Melaksanakan Diklat ASN di Inspektorat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1	Paket	✓				Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	✓	✓	✓	✓	Menyediakan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	✓	✓	✓	✓	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	Dokumen	✓	✓	✓	✓	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	✓	✓	✓	✓	Menyediakan Fasilitas Untuk Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	✓			✓	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	✓				Melaksanakan Pengadaan Meubelair
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit				✓	Melaksanakan Pengadaan Bahan Pameran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	✓	✓	✓	✓	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional



Inspektur Daerah,

Hi Dharni Haryati, SE, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002